

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, ditunjukkan oleh dominasi mata pencaharian penduduknya di sektor pertanian (Rijak dan Antariksa, 2019). Dijelaskan oleh Boelaars (1984), sistem mata pencaharian di Indonesia dapat dibagi menjadi peramu, petani ladang, petani sawah, dan masyarakat pesisir. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2015) sistem mata pencaharian suatu suku bangsa meliputi menangkap ikan, bercocok tanam, pertanian irigasi, berburu, meramu dan beternak. Berdasarkan kedua sudut pandang ini, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian.

Mata pencaharian yang beragam ini dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah tempat tinggal. Selain sebagai kondisi alami, lokasi geografis juga dipandang sebagai jenis budaya yang mencakup faktor lingkungan interaksi manusia, dan aktivitas (Riyani dkk, 2014). Berbagai elemen alam, termasuk tumbuhan, hewan, ketinggian, cuaca, dan topografi, mempengaruhi kreativitas, emosi dan kreasi seni manusia, yang pada gilirannya membentuk sistem budaya ini (Handoko dan Mujabuddawar, 2017: 123-136). Cara masyarakat suatu wilayah berkembang terkait erat dengan ketersediaan pangannya. Mata pencaharian menjadi bagian identitas kultural masyarakat (Koentjaraningrat, 2015). Letak geografis suatu wilayah agraris yang menghasilkan makanan akan menghasilkan kontribusi sosio-ekonomi yang disebut sebagai agrikultur (Santoso, 2019: 1-2).

Agrikultur merupakan sintaksi dari kata *agri* yang berarti lahan dan *kultur* yang berarti pembudidayaan. Dijelaskan oleh Nurhadi (1990:18-19) agrikultur merupakan pengetahuan manusia mengenai pengolahan tanah, produksi tanaman, dan sistem pertanian. Berkaitan dengan hal ini Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara agraris, di mana menitikberatkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya, termasuk masyarakat Minangkabau.

Dalam penelitian ini, istilah tanah sebagaimana tercantum dalam judul *Dari Tanah ke Pasar* merujuk pada lahan pertanian yang menjadi ruang awal proses produksi hortikultura oleh petani. Tanah tidak hanya dipahami sebagai media fisik

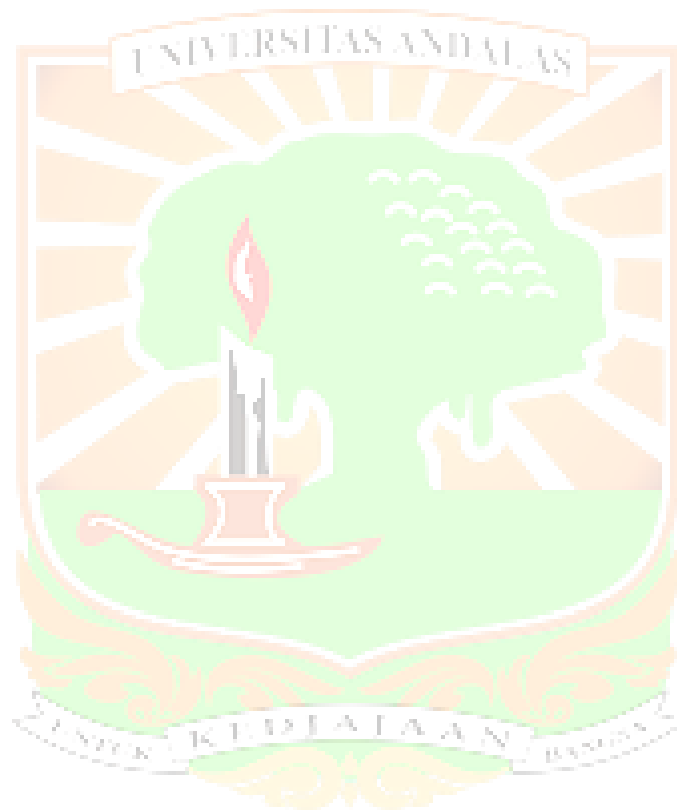
tempat tanaman ditanam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan kepemilikan, pengelolaan, serta hubungan antar individu dalam memanfaatkan lahan tersebut. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, penguasaan lahan dapat berbentuk lahan milik keluarga, lahan garapan, maupun lahan yang berkaitan dengan sistem tanah ulayat. Dari ruang produksi inilah hasil hortikultura kemudian bergerak melalui berbagai relasi sosial antara petani dan tauke hingga akhirnya ke pasar.

Masyarakat Minangkabau yang bertempat tinggal disekitaran lereng gunung Merapi sebagian besar bekerja pada sektor pertanian. Lahan pertanian di area pegunungan memang memiliki potensi besar sebagai kawasan pertanian produktif. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kondisi tanah, kecuraman lereng, curah hujan dan relief lahan (Sukoco, 1999: 25). Hal ini menunjukkan bahwa daerah di lereng pegunungan merupakan daerah yang subur dan cocok untuk memproduksi hasil pertanian.

Subsektor hortikultura merupakan salah satu bidang pertanian yang mengalami pertumbuhan signifikan khususnya di wilayah lereng pegunungan. Pertumbuhan ini di dorong oleh tingginya nilai ekonomi komoditas hortikultura serta peluang pasar yang masih terbuka luas (Pitaloka, 2017: 1-2). Komoditas hortikultura mencakup kelompok tanaman seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias (Pitaloka, 2017: 1-3). Sektor ini memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, antara lain dalam penyediaan bahan baku industri kesehatan dan kosmetik, dan aktivitas perdagangan, peningkatan produk domestik bruto (PDB), serta menciptakan lapangan kerja (Kuntari dan Rasid, 2021: 446-459).

Salah satu daerah penyumbang hasil tanaman hortikultura terbanyak di Sumatera Barat berasal dari Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Daerah yang berada di lereng Gunung Merapi ini dikenal dengan hasil pertaniannya. Hasil pertanian termasuk sayuran dan buah-buahan akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pasar baik di daerah Sumatera Barat maupun luar daerah Sumatera Barat. Berdasarkan data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam,

terlihat bahwa Kecamatan Sungai Pua mendominasi berbagai tanaman hasil produksi pertanian di Kabupaten Agam seperti yang terlihat di tabel berikut:



Tabel 1. Data Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) di Kabupaten Agam Tahun 2024

Kecamatan	Bawang Merah	Bawang Daun	Kembang Kol	Kentang	Kubis	Sawi	Wortel	Cabe
Tanjung Mutiara	-	-	-	-	-	-	-	10.650,70
Lubuk Basung	-	-	-	-	-	-	-	8.092,00
Ampek Nagari	-	-	-	-	-	-	-	6.372,89
Tanjung Raya	3.285,00	-	-	-	-	-	-	24.376,80
Matur	16.405,00	5.280,00	-	-	5.005,00	-	-	20.142,10
IV Koto	5.594,05	7.503,75	-	1.460,00	1.105,00	962,50	6.785,00	36.523,50
Malalak	1.377,50	1.710,00	-	-	-	852,50	-	8.414,81
Banuhampu	2.754,80	4.560,00	4.273,75	-	4.467,50	4.372,50	3.850,00	46.819,55
Sungai Pua	3.473,45	7.990,00	8.968,75	1.642,50	10.409,00	9.385,00	5.727,50	36.833,28
Ampek Angkek	3.426,00	1.255,00	-	-	1.105,00	1.015,00	-	1.664,30
Canduang	3.658,45	2.407,50	-	880,00	2.375,00	2.815,00	2.856,00	22.545,30
Baso	4.710,25	1.657,50	6.725,00	-	7.785,00	8.260,00	-	25.037,75
Tilatang Kamang	2.773,60	2.068,25	-	-	-	-	-	38.110,85
Kamang Magek	3.086,60	-	-	-	-	-	-	8.630,73
Palembayan	-	-	-	-	-	-	-	24.790,00
Palupuh	97,00	-	-	-	-	-	-	20.391,80
Agam	34.432,00	50.641,70	19.967,50	3.982,50	32.251,50	27.662,50	19.227,50	350.396,36

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam Tahun 2024

Berdasarkan data hasil produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut kecamatan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Agam tahun 2024, jika dilihat dari jumlah hasil produksi tanaman yang ada di Kabupaten Agam, Kecamatan Sungai Pua merupakan kecamatan penghasil tanaman hortikultura yang paling banyak. Adapun tanaman hortikultura yang ada di Sungai Pua meliputi bawang daun, bawang merah, kembang kol, kentang, kubis, sawi, wortel, dan cabe kering.

Namun, keberhasilan produksi pertanian tidak secara otomatis menjamin kelancaran pemasaran hasil panen. Komoditas hortikultura memiliki karakteristik yang mudah rusak, bergantung pada musim, dan membutuhkan distribusi yang cepat agar tetap memiliki nilai ekonomi. Tanaman hortikultura umumnya memerlukan lahan yang luas untuk menanam (Nuraini, 2019:1-2). Kondisi ini membuat petani tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi, tetapi juga pada sistem distribusi yang mampu menghubungkan hasil panen dengan pasar.

Dalam praktiknya, distribusi hasil pertanian hortikultura di pedesaan tidak berjalan melalui mekanisme pasar yang sederhana. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor, seperti petani, tauke, pedagang pasar, sopir angkut, hingga pekerja pasar. Di antara aktor tersebut, tauke sering menempati posisi penting sebagai penghubung antara petani dan pasar. Tauke¹ memiliki akses terhadap jaringan perdagangan, informasi harga, serta sarana transportasi yang tidak dimiliki oleh petani.

Dalam sistem distribusi hasil pertanian, pasar tidak bisa dipandang semata-mata sebagai ruang fisik untuk transaksi jual beli, melainkan sebagai struktur sosial-ekonomi yang memediasi nilai, informasi, dan akses antar aktor. Dijelaskan oleh Porter (1985: 33-61) melalui konsep *value chain* menekankan bahwa setiap aktor dalam rantai nilai, mulai dari produsen (petani), perantara (tauke), hingga pedagang pasar memainkan peran strategis dalam menciptakan dan menambah nilai produk sebelum sampai ke konsumen akhir.

¹ Secara harfiah, tauke merupakan orang yang membeli hasil bumi yang kemudian diperjual belikan kembali atau pedagang perantara (Partanto & Al Barry, 1994: 745).

Dalam konteks jaringan distribusi hortikultura, pasar menjadi arena penting dalam menentukan harga, menyebarkan informasi, dan menjadi tujuan utama distribusi. Namun demikian, tidak semua petani memiliki akses langsung ke pasar karena keterbatasan modal, logistik, dan jaringan sosial. Hal ini menyebabkan petani lebih bergantung pada tauke sebagai *middleman* yang memiliki hubungan langsung dengan pasar dan mampu mengintegrasikan kebutuhan produksi di tingkat petani dengan permintaan pasar. Dengan demikian, sistem distribusi hortikultura tidak bersifat linier, melainkan merupakan jaringan relasional yang kompleks dan saling terikat antara petani, tauke, dan pasar. Pemahaman terhadap pasar sebagai bagian integral dari jaringan distribusi² menjadi penting untuk melihat bagaimana proses distribusi, kekuasaan, dan nilai ekonomi dikelola di tingkat lokal.

Karena itu, hubungan antara petani dan tauke tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan ekonomi jual beli. Hubungan tersebut sering kali dibangun melalui kedekatan sosial, kepercayaan, pengalaman kerja sama yang panjang, serta kebutuhan timbal balik dalam menghadapi ketidakpastian produksi dan fluktuasi harga pasar. Dengan kata lain, distribusi hasil pertanian sebenarnya terbentuk melalui relasi sosial yang kemudian berkembang menjadi jaringan distribusi.

Salah satu fenomena yang telah lama melekat dalam sektor pertanian adalah kecenderungan untuk memandang tauke secara negatif, khususnya dalam konteks pemasaran hasil pertanian. Namun persepsi ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab peran tauke tidak selalu membawa dampak merugikan. Sebaliknya, tauke juga memainkan peran yang konstruktif dalam mendukung keberlangsungan ekonomi lokal. Dijelaskan oleh Asromi dan Azizah (2015: 81) bahwa tauke memiliki kontribusi penting sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat lokal. Dalam sistem distribusi hasil pertanian, peran tauke sangat signifikan karena mereka memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat, sesuatu yang umumnya tidak dimiliki oleh petani. Kekuatan jaringan inilah yang kemudian membentuk relasi

² Menurut Callon (1986) jaringan distribusi merupakan hasil dari kerja kolektif aktor sosial, yang membentuk akses, kekuasaan, dan eksklusivitas. Dalam hal ini jaringan distribusi hortikultura tidak semua petani memiliki akses langsung dalam mengakses pasar.

ketergantungan antara petani dan tauke, yang pada akhirnya memperkuat posisi tauke sebagai aktor sentral dalam proses pemasaran hasil pertanian.

Hubungan antara tauke dan petani ini dapat bertahan karena adanya pemberian perlindungan yang subsistensi kepada petani. Hal inilah yang membuat tauke tetap ada karena tauke memiliki sifat fungsional. Hal ini didukung oleh pendapat Rustinsyah (2011: 179-180) yang menjelaskan hubungan ketergantungan antara tauke dan petani dapat merangsang kegiatan ekonomi terutama dalam pendistribusian hasil pertanian khususnya daerah pertanian. Pendistribusian hasil pertanian merupakan bagian dari sistem ekonomi petani yang berimplikasi terhadap budaya petani pedesaan. Hal ini disebabkan keterlibatan proses dari banyak pihak, menciptakan berbagai peran dan jaringan di masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada petani tersebut.

Tauke memiliki peranan penting dalam pendistribusian pasca panen. Hal ini menunjukkan bahwa tauke selalu memiliki hubungan dengan petani. Menurut Utami dan Gunawan (2023, 120:121), petani dan tauke membentuk hubungan yang simetris, dengan petani di strata terbawah dan tauke di strata atas. Ikatan ini mengikat keduanya karena saling bergantung. Keberadaan petani sebagai penyedia produk, sedangkan tauke berpihak sebagai penghubung antara petani dengan pasar untuk pendistribusian hasil pertanian.

Namun, hubungan ini tidak selalu bersifat linear dan hierarkis. Dalam konteks jaringan sosial, baik petani maupun tauke saling membentuk ikatan sosial³ berdasarkan kepercayaan, kepentingan bersama, dan realitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji peran tauke sebagai penyalur distribusi utama, tetapi juga menempatkan petani sebagai aktor utama dalam jaringan sosial distribusi hortikultura.

³ Dijelaskan oleh Durkheim (1983) bahwa ikatan sosial merupakan kekuatan moral yang menjaga keutuhan masyarakat melalui kesamaan atau saling ketergantungan antar individu. Ikatan sosial ini akan berimplikasi atas pada ciri solidaritas mekanik yakni dasar kesamaan asal, kedekatan, dan saling percaya. Namun, bisa mengalami pergeseran menuju solidaritas mekanik karena adanya ketergantungan antar individu akibat pembagian kerja yakni pembagian peran dalam jaringan jaringan distribusi.

Argumen dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang berpendapat bahwa kehadiran tauke dalam sistem pendistribusian hasil pertanian justru merugikan petani, terutama dalam hal harga. Namun pada beberapa kasus, kehadiran tauke justru sangat diterima. Pada kasus yang terjadi di Bogor yaitu petani manggis merasa sangat membutuhkan kehadiran tauke untuk kelangsungan ekonominya, terutama dalam pendistribusian hasil panen tanpa harus melalui banyak tangan karena rantainya yang panjang (Azizah, 2015: 87). Hal ini juga terjadi di Lumajang, petani hortikultura merasa kehadiran tauke sangat memudahkan mereka, karena tauke mampu mengangkut dan mengurus sendiri pemanenan hingga pengangkutan (Idris dkk, 2022: 47-48).

Beberapa kasus menjelaskan bahwa kehadiran tauke dalam sistem pertanian selalu memberatkan petani karena tidak adanya transparansi harga. Karena harga jual hasil panen mereka yang relatif rendah atau bahkan tidak ada, petani di Lampung sangat dirugikan oleh tauke (Hasanuddin, Trully G, Endaryanto, 2009:168). Tauke seringkali menetapkan harga panen tanpa bernegosiasi terlebih dahulu dengan petani, sehingga hal ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami petani di Rokan Hulu (Kausar dan Zaman, 2011:195).

Meskipun kajian mengenai pemasaran hasil pertanian dan peran pedagang perantara telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian lebih menekankan aspek ekonomi seperti rantai pasok, efisiensi distribusi, atau akses pasar bagi petani. Kajian tersebut cenderung melihat distribusi sebagai mekanisme ekonomi yang bersifat rasional dan struktural, sementara itu, penelitian yang secara khusus menempatkan relasi sosial antara petani dan tauke sebagai dasar terbentuknya jaringan distribusi hasil pertanian masih relatif terbatas, terutama penelitian yang menggambarkan secara mendalam praktik hubungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Dengan demikian masih terdapat kekosongan kajian dalam memahami bagaimana hubungan sosial antara petani dan tauke tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi, tetapi juga membentuk dan mempertahankan jaringan distribusi hasil pertanian di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menelaah bagaimana hubungan sosial antara petani hortikultura dan

tauke terbentuk serta bagaimana relasi tersebut menghasilkan jaringan distribusi hasil pertanian di Nagari Sungai Pua. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini tidak hanya melihat distribusi sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang melibatkan kepercayaan, ketergantungan, serta strategi para aktor dalam mempertahankan hubungan mereka dengan pasar.

1.2 Rumusan Masalah

Kajian literatur mengenai pertanian di sekitaran lereng gunung menjelaskan bahwa kegiatan pertanian hortikultura ini merupakan kegiatan yang sering dijumpai di hampir seluruh masyarakat yang berdomisili di daerah lereng pegunungan. Di kawasan lereng pegunungan, sektor pertanian dijadikan sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Berbagai hal ini menyangkut peluang ekonomi, dampak pembangunan, kebijakan pemerintah dan dinamika kependudukan yang sering mewarnai pertanian (Purwanto, 2010: 18-19).

Nagari Sungai Pua merupakan kawasan dengan lanskap dataran tinggi yang berada dalam kawasan Gunung Merapi. Kondisi wilayah yang berada di dataran tinggi ini sangat potensial untuk menjadi kawasan lahan pertanian. Hal itu membuat kawasan Nagari Sungai Pua banyak dijadikan sebagai lahan pertanian hortikultura. Pertanian hortikultura merupakan produk tanaman dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarma, dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/ triwulan (BPS Kabupaten Agam, 2024: 106).

Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang memiliki siklus panen yang lebih singkat dibandingkan tanaman pangan lainnya (Ilmika, 2023: 4). Industri hortikultura juga dihadapi dengan berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, masalah penggunaan lahan, dan distribusi hasil pertanian. Pendistribusian hasil pertanian hortikultura harus dilakukan dengan cepat karena komoditas seperti sayuran dan buah-buahan ini mudah rusak. Pendistribusian hasil pertanian dengan cepat juga penting untuk memenuhi permintaan konsumen dan mencegah kerugian bagi petani.

Distribusi hasil pertanian hortikultura di Nagari Sungai Pua merupakan bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai aktor, dengan petani dan tauke sebagai dua pihak yang paling dominan. Hubungan antara petani dan tauke telah berlangsung sejak lama dan membentuk interaksi yang bukan hanya dilandaskan dengan ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Relasi ini mencerminkan adanya keterikatan yang dibangun di atas dasar kepercayaan, solidaritas, serta kebutuhan timbal balik dalam menghadapi tantangan struktural, seperti akses pasar, minimnya modal, dan ketidakstabilan harga komoditas hortikultura.

Kondisi geografis wilayah yang berada di lereng Gunung Merapi, dengan keterbatasan infrastruktur dan akses distribusi langsung ke pasar, menjadikan tauke sebagai figur penting yang menjembatani hasil panen petani dengan pasar yang lebih luas. Namun, relasi ini juga kerap menimbulkan ketegangan karena adanya ketimpangan posisi tawar, minimnya transparansi harga, serta ketergantungan ekonomi yang bisa berlangsung secara jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana sistem distribusi tersebut dijalankan secara konkret, serta bagaimana sistem dinamika relasi sosial antara petani dan tauke membentuk jaringan distribusi hortikultura yang ada.

Penelitian ini memandang bahwa hubungan petani dan tauke tidak bisa disederhanakan sebagai hubungan eksploitatif semata, tetapi juga harus dipahami sebagai bagian dari jaringan distribusi hortikultura yang kompleks, di mana pasar memainkan peran penting sebagai arena pertukaran nilai dan akses ekonomi. Dalam konteks masyarakat agraris lokal, jaringan ini bersifat tertanam (*embedded*) dalam hubungan sosial, kultural, dan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Granovetter. Relasi yang terbentuk tidak hanya berdasarkan logika ekonomi, tetapi juga nilai moral, solidaritas, dan negosiasi timbal balik, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *moral economy* (Scott) dan model patron-klien (Wolf dan Koentjaraningrat). Dengan demikian, hubungan antara petani, tauke, dan pasar harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem distribusi sosial-ekonomi, di mana masing-masing aktor memainkan peran yang saling mempengaruhi.

Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pola relasi dan implikasinya terhadap sistem distribusi hasil pertanian hortikultura, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama yakni:

1. Bagaimana hubungan sosial antara petani hortikultura dan tauke dalam konteks masyarakat lokal di Nagari Sungai Pua?
2. Bagaimana proses mekanisme jalur distribusi hasil pertanian hortikultura dari petani ke konsumen, serta aktor-aktor yang terlibat dalam setiap tahapannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hubungan sosial antara petani hortikultura dan tauke dalam konteks masyarakat lokal di Nagari Sungai Pua.
2. Menganalisis proses mekanisme jalur distribusi hasil pertanian hortikultura dari petani ke konsumen, serta aktor-aktor yang terlibat dalam setiap tahapannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian antropologi ekonomi, khususnya dalam memahami distribusi hasil pertanian hortikultura sebagai praktik sosial yang tertanam dalam relasi sosial. Penelitian ini memperkaya pembacaan terhadap konsep moral ekonomi, embeddedness, dan patron-klien dengan menghadirkan temuan empiris bahwa relasi petani dan tauke di Nagari Sungai Pua tidak sepenuhnya berbasis ketergantungan modal atau dominasi ekonomi.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian multidisiplin yang mengkaji relasi sosial-ekonomi pedesaan, jaringan distribusi komoditas pertanian, serta dinamika perubahan hubungan

patronase dalam konteks lokal. Temuan ini juga membuka ruang diskusi bahwa pola relasi petani-tauke tidak dapat digeneralisasi secara seragam antarwilayah, melainkan bersifat kontekstual dan situasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pemerintah daerah, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan pertanian mengenai pentingnya jaringan sosial dalam sistem distribusi hortikultura. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi hasil pertanian tidak semata-mata digerakkan oleh logika pasar, tetapi juga oleh relasi kepercayaan, keberlanjutan hubungan dan jaringan distribusi yang luas. Dengan demikian, kebijakan penguatan sektor pertanian hortikultura perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan jaringan lokal yang telah terbangun antara petani dan tauke.

Bagi petani dan pelaku distribusi, penelitian ini juga dapat menjadi refleksi bahwa hubungan kerja yang bersifat lebih simetris dan berbasis jaringan dapat menjadi alternatif model relasi ekonomi pedesaan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar.

